

***INTERNET FINANCIAL REPORTING: DITEKTOR ESKALASI  
PEMBIAYAAN MODAL UMKM BERBASIS STAKEHOLDER VALUE  
SEBAGAI IMPLEMENTASI FINANCIAL TECHNOLOGY***

***INTERNET FINANCIAL REPORTING: FINANCIAL TECHNOLOGY  
FEASIBILITY ESCALATION DESCRIPTION BASED ON VALUE  
STAKEHOLDER AS FINANCIAL TECHNOLOGY IMPLEMENTATION***

**Fahmi Firdaus<sup>1</sup>, M. Walidur Rif'ih, Bunga Maharani**

Universitas Jember

Email: [fahmifirdaus14011997@gmail.com](mailto:fahmifirdaus14011997@gmail.com)

**ABSTRAK**

Saat ini, di era MEA memberikan peluang serta tantangan bagi UMKM menjadi kompetitif. UMKM memiliki potensi untuk membangun ekonomi negara, tetapi sulit untuk dikembangkan karena pembiayaan modal terbatas. Di era digital, Peraturan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 pergi untuk mendapatkan pembiayaan modal berdasarkan teknologi informasi. UMKM dituntut lebih transparan dan akuntabel untuk menjadikan pelaporan keuangan sebagai syarat bankable dan layak. Untuk mendukungnya, IFR merupakan upaya meningkatkan nilai stakeholder dalam mengoptimalkan Fintech. Metode ini menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data adalah dokumen BPS dan Kementerian UMKM pada 2012-2017 dan studi kepustakaan. Hasil analisis itu, nilai stakeholder dapat meningkatkan keunggulan kompetitif yang berdampak pada nilai layak dan bankable. Terkait pada Technology Acceptance Model (TAM) Teori yang menggunakan IT akan positif terhadap reaksi pengguna. Terkait dengan Signaling Theory, pemanfaatan IFR sebagai teknologi untuk pengungkapan informasi keuangan UMKM akan meningkatkan asimetri informasi stakeholder.

**Kata Kunci:** Pelaporan Keuangan Internet, Teknologi Keuangan, Pembiayaan Modal, Nilai Stakeholder

**ABSTRACT**

*Today, in MEA era provides opportunities as well as challenges for UMKM be competitive. UMKM has the potential to build the country's economy, but it's difficult to develop because limited capital financing. In digital era, The regulation Number 77/POJK.01/2016 as away to get the capital financing based on information technology. UMKM are required more transparent and accountable to make financial reporting as a requirement bankable and feasible. To support it, IFR is an effort to increase stakeholder value in optimizing Fintech. The Method have used qualitative descriptive. The data source is the document of BPS and Kementerian UMKM on 2012-2017 and the literature study. The results of the analysis that, stakeholder value can increase competitive advantage that impact on feasible and bankable value. Related on Technology Acceptance Model (TAM) Theory that use IT will be positively to user reactions. Related to the Signaling Theory, the utilization of IFR as a technology for disclosure financial information of UMKM will be improve the information asymmetry of stakeholders.*

**Keywords:** *Internet Financial Reporting, Financial Technology, Capital Financing, Stakeholder Value*

**PENDAHULUAN**

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998-1999 memberikan dampak berkelanjutan (*sustainable effect*) terhadap perekonomian negara. Sebagian besar usaha berskala formal mengalami kebangkrutan hingga 80% dari total

keseluruhan usaha besar di Indonesia. Menghadapi permasalahan tersebut, UMKM memiliki kontribusi positif untuk tetap bertahan dalam membangun perekonomian negara, sehingga pemerintah harus menaruh perhatian lebih terhadap pertumbuhan UMKM (Nugroho, *et.al.*, 2012). Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Blue Print* Pembiayaan Tahun 2016, jumlah UMKM di Indonesia memiliki kontribusi sebesar 99,98% dari total unit usaha di Indonesia. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik per April 2017 dan Departemen Pengembangan UMKM, pertumbuhan UMKM terus mengalami peningkatan hingga saat ini, dengan total UMKM 54.246.761 unit (2016) dan 56.583.231 unit (2017).

Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan signifikan sejak 5 tahun pasca krisis ekonomi terjadi. Tahun 2013 total UMKM di Indonesia sebanyak 57.901.000, dengan proporsi terbesar adalah usaha mikro yang mencapai 57.189.393 unit (98,8%), kemudian usaha kecil sebanyak 654.222 unit (1,1%) dan usaha menengah sebanyak 52.106 unit (0,1%) (Data Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Pertumbuhan tersebut terus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dimana UMKM mampu menyerap jumlah tenaga kerja sebesar 97,22% (Data Badan Pusat Statistik, Per April 2017) dan menyumbang 61,54% terhadap produk domestik bruto (PDB) (Data Bank Kementerian Koperasi dan UKM, 2017) dari total keseluruhan jumlah UMKM 56.583.231 unit pada tahun 2017.

Namun, pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan pembiayaan modal sebagai literasi perkembangan eksistensi UMKM. Permasalahan pembiayaan modal menyebabkan kemunduran akan eksistensi UMKM dalam persaingan global saat ini. Dampaknya adalah pada tahun 2017, tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya sebesar 5,2% dengan rata-rata pertumbuhan sejak tahun 2014 per tahun 2,41% (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2014). Penyebab utama dikarenakan melemahnya perekonomian global yang berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia, dimana permasalahan tersebut sebenarnya dapat diperlambat dengan munculnya UMKM sebagai pondasi perekonomian di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi UMKM tidak sejalan dengan eksistensi pertumbuhannya akibat rendahnya pembiayaan modal (Bank Indonesia, 2015). Permasalahan klasik seputar pembiayaan dan pengembangan usaha UMKM masih menjadi permasalahan yang krusial. Data Bank Indonesia (2015) dan Ikatan Akuntan Indonesia (2017) menyebutkan bahwa, pemerintah mencatat pada tahun 2014 dari total 56,4 juta UMKM yang ada diseluruh Indonesia, hanya 30% UMKM yang mampu mengakses pembiayaan. Dari prosentase tersebut, sebanyak 76,1% memperoleh pembiayaan dari bank dan 23,9% mengakses dari non-bank, termasuk koperasi. Data tersebut menunjukkan bahwa 60%-70% dari seluruh UMKM belum memiliki akses pembiayaan. Pada tahun 2017, total pembiayaan yang dapat diakses hanya sebesar 14,35 juta rekening (Data kementerian Koperasi dan UKM, 2017).

Kemacetan pembiayaan modal disebabkan karena UMKM tidak mampu melengkapi informasi laporan keuangan sesuai standar yang berlaku (Bank Indonesia, 2015). Sifat dari UMKM yang hanya berfokus pada *income gathering*, mempersulit *stakeholder* penyedia biaya modal, seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk mengambil keputusan dan memprediksi prospek usaha

kedepannya (Alyas dan Rakib, 2017). Dalam era digital saat ini, guna memenuhi pembiayaan modal UMKM yang lebih efektif dan efisien, pihak perbankan/*stakeholder* lainnya telah mengajukan pinjaman berbasis teknologi informasi untuk mempercepat proses pencairan pinjaman modal pembiayaan tanpa melakukan tatap muka. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015 perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan pemberian teknis dalam membangun UMKM perlu dikembangkan. Regulasi tersebut turut didukung dengan munculnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjam meminjam dan pembiayaan berbasis teknologi informasi, dimana regulasi tersebut memberikan peluang bagi *financial technology* pada level usaha, termasuk UMKM dalam menghadapi era digital, khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dalam mendukung langkah tersebut, tidak hanya melalui regulasi, namun pemerintah telah menetapkan pemberian pinjaman modal pembiayaan bagi UMKM paling rendah 10% untuk tahun 2016, 15% tahun 2017 dan 20% pada tahun 2018. Kontribusi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pinjaman pembiayaan modal pada UMKM melalui pinjaman bank dan *stakeholder* lainnya. Dalam rangka menunjang perubahan literasi tersebut, maka UMKM diharuskan membuat laporan keuangan (*financial report*) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku umum untuk memudahkan pihak pemberi pinjaman melakukan analisis kinerja dan memenuhi standar laporan keuangan yang *comparable*. Dalam konsep yang sama, UMKM harus melaporkan segala aktifitas usaha dan non operasional sebagai bagian dari laporan non keuangan.

Tujuan pembuatan laporan keuangan dan non keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM melalui IFR guna memenuhi syarat *bankable* dan *feasible* yang dibutuhkan oleh pihak pemberi pinjaman dalam optimalisasi *financial technology* di era digital saat ini, sehingga akan memberikan penilaian lebih (*trust*) terhadap pengambilan keputusan pihak *stakeholder* untuk memberikan pinjaman modal pembiayaan (*stakeholder value*). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi berupa inovasi *applicable* bagi UMKM guna meningkatkan perolehan pembiayaan modal melalui penyajian laporan keuangan sesuai SAK EMKM sebagai syarat *bankable* dan *feasible*, sehingga mampu meningkatkan *stakeholder value*, serta memberikan gambaran terkait peran regulator dalam menyusun regulasi terkait distribusi pembiayaan modal UMKM. Memecahkan permasalahan klasik terkait pembiayaan modal UMKM dalam era digital saat ini, maka perlu adanya inovasi sebagai *pionering* untuk mengatasi permasalahan tersebut. Uraian tersebut mendorong penulis untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah berjudul “*Internet Financial Reporting: Ditektor Eskalasi Pembiayaan Modal UMKM Berbasis Stakeholder Value Sebagai Implementasi Financial Technology*”.

## METODE

### Sumber Data

Dalam penulisan paper ini, data dan informasi lain terkait diperoleh menggunakan data sekunder berupa dokumen yang diperoleh (dengan ketentuan)

dari data publikasi. Sumber data berasal dari Data Bank Indonesia, *Review Report Indonesian Bank Blue Print*, Badan Pusat Statistik (BPS), LPPI-BI, dan Departemen Pengembangan UMKM, Data Kementerian Koperasi dan UKM, Review Data Ikatan Akuntan Indonesia, Data kredit UMKM Bank Indonesia dan studi literatur.

#### **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Sumber data yang telah diperoleh dianalisis berdasarkan fakta yang ada dan dikembangkan sesuai dengan analisis pemikiran yang digambarkan dalam kerangka konseptual penulisan. Analisis data diperlukan untuk menunjukkan uraian dan deskriptif dari data sebagai sumber informasi terkait permasalahan yang diangkat.

#### **Studi Literatur**

Dalam penulisan ini dilakukan sebuah studi literatur sebagai penegas kerangka konseptual yang dikembangkan. Menurut Nazir (2003:93) menyebutkan bahwa studi literatur menekuni dan menelaah sebuah literatur tanpa memperdulikan apakah penelitian literatur yang digunakan dilakukan menggunakan data sekunder maupun primer. Studi Literatur diperlukan dalam mendukung sumber data yang dianalisis, sehingga memperoleh uraian yang relevan atas data yang diperoleh. Studi Literatur sebagai bagian dalam pengembangan pemikiran konseptual pemecahan masalah yang diangkat.

### **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah analisis data dan sumber informasi lain terkait telah dilakukan, sehingga garis lini positif kerangka pemikiran sesuai dengan kerangka konseptual. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap rumusan masalah yang diangkat serta rekomendasi atas uraian pemecahan masalah tersebut. Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam menarik titik temu permasalahan yang diangkat sesuai dengan data dan informasi terkait sebagai pendukung kesimpulan akhir.

### **Pemberian Rekomendasi**

Rekomendasi yang diajukan berupa rekomendasi yang mempertimbangkan tingkat *cost and benefit* serta hambatan dan dorongannya setelah rekomendasi tersebut diterapkan. Tujuan analisis ini adalah untuk menunjukkan bahwa rekomendasi yang diajukan bersifat *applicable* bagi keberlanjutan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah terkait pembiayaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran UMKM Dalam Membangun Perekonomian Nasional**

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini berada dalam masa perbaikan pasca krisis ekonomi terjadi. Salah satu sektor yang mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Raselawati, 2011). Peran UMKM sangat membantu perekonomian negara untuk tetap bertahan dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan (Susilo, 1996). Kecenderungan krisis ekonomi menyebabkan banyak perusahaan formal memberhentikan karyawannya, sehingga pertumbuhan pengangguran agregat semakin meningkat. Kondisi tersebut telah memosisikan UMKM sebagai bentuk usaha yang secara inklusi mampu mengurangi pengangguran akibat krisis ekonomi tersebut (Partomo dan Soedjono, 2004). UMKM memiliki peranan yang krusial dalam membangun perekonomian nasional yang mandiri (Shonhadji, *et.al.*, 2017), disamping memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi nasional, juga berperan dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2014 pemerintah berusaha melakukan ratifikasi peningkatan daya saing nasional dalam rangka menghadapi persaingan global MEA, diantaranya adalah melalui pengembangan UMKM (Wilopo *et.al.*, 2017). Perkembangan UMKM di Indonesia dinilai mampu mendorong Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta mengurangi tingkat pengangguran (Indrajit, 2017). Data Bank Kementerian Koperasi dan UKM mencatat kontribusi UMKM terhadap PDB menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana kontribusinya sebesar 52,22% (2014), 57,84% (2015), 60,34% (2016) dan 61,54% (2017). Disisi lain, UMKM turut memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja (Irawan, *et.al.*, 2016). Tingkat penyerapan tenaga kerja UMKM hingga 97% dari total pengangguran di Indonesia sejak tahun 2015-2017 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 menyebutkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja UMKM mencapai angka 92,23% dan sisanya 7,77% diserap non-UMKM. Berdasarkan data LPPI-BI per Desember

2017, prosentase penyerapan tenaga kerja dari UMKM sebesar 97,22% dari total keseluruhan UMKM.

Dalam penelitian Van Gills (2007) menyatakan bahwa UMKM adalah mesin penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peran UMKM setidaknya dapat dilihat dari 5 bagian, yaitu: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai sektor, (2) penyedia lapangan pekerjaan yang besar, (3) pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam membayar neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

#### **Kendala Pertumbuhan UMKM**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang prospektus dalam membangun perekonomian di Indonesia (Mariani, 2017). Regulasi UU No. 20 tahun 2008 merupakan cikal bakal usaha pemerintah dalam mengembangkan usaha UMKM. Dalam mengembangkan kegiatan operasionalnya, UMKM memiliki kendala yang sangat besar yaitu masalah modal, teknologi dan keahlian manajerial (Soetrisno, 2015). Permasalahan klasik yang belum terselesaikan pada tingkat urgensi adalah kendala pembiayaan modal (Hasyim, 2013). Berdasarkan *Review Report Indonesian Bank* tahun 2015 menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 dari total 56,4 juta UMKM di Indonesia, 60%-70% UMKM belum memperoleh pembiayaan modal. Badan Pusat Statistik per April 2017 mencatat hingga saat ini total pembiayaan kredit UMKM sebesar 14,35 juta dari total 56.583.231 UMKM.

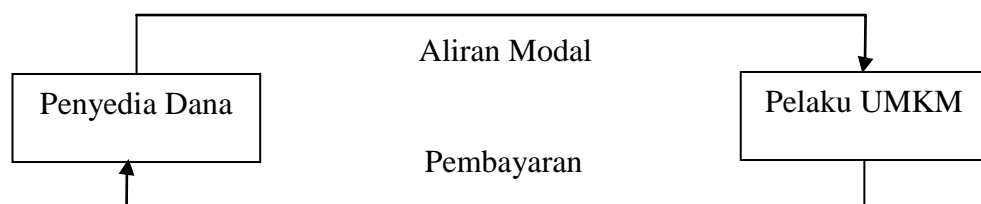
Eksistensi dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara tidak sejalan dengan tingkat pertumbuhan pembiayaan modal yang hanya terealisasi 30% (Lawita dan Samsiah, 2017). Berdasarkan data Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2017) tingkat realisasi penyerapan modal UMKM hanya 30%-40% di Indonesia. Prosentase ini masih cukup rendah jika dibandingkan realisasi pembiayaan modal pada negara berkembang lainnya. Permasalahan tersebut dikarenakan UMKM belum mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar (Bank Indonesia, 2015). Pelaku UMKM beranggapan bahwa pembuatan laporan keuangan secara sistematis merupakan langkah yang sulit dan rumit untuk diterapkan (Kurnianto, 2012). Kecenderungan UMKM lebih fokus untuk meningkatkan *gathering income*, tanpa memfokuskan pada permasalahan pencatatan merupakan permasalahan internal (Alyas dan Rakib, 2017). Dampaknya adalah para pelaku UMKM banyak mengalami permasalahan terkait pemisahan dana pribadi dan dana usaha serta kemacetan perolehan modal.

#### **Literasi Keuangan Skema Pembiayaan Modal UMKM**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM, bank umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan minimal 20% yang dihitung berdasarkan ratio kredit atau pembiayaan yang berlaku untuk tahun 2018. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memberikan pembiayaan modal kepada UMKM agar lebih luas dalam menjangkaunya. Data kredit UMKM Bank Indonesia menunjukkan adanya peningkatan pembiayaan sebesar 11,93 juta (2015), 12,85 juta (2016) dan 14,35 juta rekening (2017). Namun dalam praktiknya sebagian

besar pelaku UMKM tidak memperoleh pembiayaan dari program KUR (Kunaifi *et.al.*, 2017). Realisasi pembiayaan modal di Indonesia hanya terjadi pada *range* 30%-40% dari total 56 juta lebih UMKM di Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

Menanggapi permasalahan tersebut, Bank Umum maupun Bank Syariah telah memberikan produk pembiayaan untuk UMKM dan *Micro Finance* (Indrajit, 2017). Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan persetujuan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008), dimana pihak bank selalu menyediakan dana yang sangat besar untuk pembiayaan sehingga berpotensi menyumbang pendapatan yang besar (Indrajit, 2017).



**Gambar 2.** Skema Pembiayaan UMKM (Indriani dan Fitria, 2017)

Menurut Kunaifi (2017), pihak lembaga keuangan formal/non-formal harus menyediakan dana yang cukup besar terhadap pembiayaan modal UMKM, terkait dengan regulasi pembiayaan yang sudah ada (LPPI & BI, 2015). Kecukupan modal pihak penyedia dana seperti bank akan berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Akan tetapi, tingkat penyediaan modal bank yang tinggi tidak diikuti dengan tingkat pemanfaatan modal UMKM kedalam aktiva yang menguntungkan, sehingga hal tersebut memungkinkan pihak bank lebih memilih untuk menyalurkan modalnya kedalam aktiva berbentuk kredit dan mengurangi adanya *idle fund* (Irawan *et.al.*, 2016).

Praktiknya bank sangat sulit untuk mengucurkan kredit terhadap usaha mikro, dibandingkan dengan kemudahan kucuran pembiayaan pada usaha non-mikro. Berdasarkan Data Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (2016) nilai pembiayaan untuk UMKM mengalami fluktuasi yang curam hingga -0,17 pada bulan Oktober 2016. Padahal jika dibandingkan, usaha mikro memiliki prestasi yang sangat membanggakan dengan tingkat kemacetan kredit yang relatif kecil. Dalam penelitian Indriani dan Fitria (2017) Pada bulan Juli 2017 total NPL usaha UMKM sebesar 3,9% jauh lebih kecil jika dibandingkan total kredit perbankan yang mencapai 10,2%. Jumlah tersebut relatif menguntungkan jika dibandingkan total *Non Performing Loan* (NPL) UMKM berdasarkan data Departemen Pengembangan UMKM-Bank Indonesia tahun 2016 sebesar 3,25% (mikro), 4,75% (kecil) dan 5,75% (menengah). Permasalahan permodalan UMKM terbilang unik, karena UMKM memiliki prospektus yang potensial (*feasible*), namun tidak memenuhi syarat perbankan untuk memperoleh pembiayaan (*non-bankable*). Permasalahan kelengkapan persyaratan formal/ administratif dalam memperoleh kredit menjadi penghambat perolehan pembiayaan KUR (Nkundabayanga, (2014); (Indriani dan Fitria (2017) . Syarat yang krusial

diperlukan untuk memperoleh pembiayaan baik dari program KUR, Bank dan pembiayaan modal dari investor adalah peran laporan keuangan dan informasi terkait/laporan non-keuangan UMKM (Kunafi *et.al.*, 2017).

Permasalahan tersebut telah memposisikan literasi keuangan penyaluran pembiayaan modal UMKM di Indonesia pada level rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya (Kunafi, 2017). Sejatinya, UMKM merupakan industri yang membutuhkan pembinaan secara terus menerus (Kasim & Kuresin, 2017). Konsep inilah yang seharusnya membutuhkan perhatian lebih terhadap masalah pencairan pembiayaan modal oleh bank, mengingat peranan bank berdasarkan UU No.10 tahun 1998 sebagai pengganti dari UU No.7 tahun 1992 pasal 3 bahwa bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengembalikan dalam bentuk pembiayaan (Irawan, *et.al.*, 2016).

### **Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan dan pembukuan atas kegiatan operasionalnya (Soni, 2010). Kendala tersebut berdampak pada keberlangsungan usaha dan kinerja keuangan UMKM yang berujung pada kemacetan perolehan pembiayaan modal karena tidak memenuhi syarat administratif (*bankable* dan *feasibel*) (Kunafi, 2017). Menanggapi permasalahan tersebut, Akuntansi memiliki peran strategis dalam membangun pertumbuhan UMKM dalam literasi pembiayaan modal melalui penyajian laporan keuangan dan non keuangan usaha kepada para *stakeholder* sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK-EMKM). Standar tersebut merupakan perubahan dari SAK-ETAP yang sebelumnya digunakan sebagai pedoman pada entitas kecil hasil dari adopsi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) yang dinilai terlalu kompleks dan tidak *applicable*.

Namun, penerapan ilmu akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan saat ini belum memperoleh posisi yang signifikan, karena belum banyak diterapkan pada pelaku UMKM di Indonesia (Nugroho *et.al.*, 2012). Pelaku UMKM masih menuai berbagai kendala dan kelemahan dalam penyajian laporannya. Kurangnya kemampuan (*skills of job*) pelaku UMKM dalam bidang pengelolaan usaha merupakan kendala yang dihadapi UMKM, diantaranya rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman pelaku UMKM tersebut dalam bidang akuntansi. Pembukuan UMKM pada umumnya dilakukan dengan cara-cara sederhana dan tidak detail. Kendala tersebut telah memberikan keterbatasan bagi pihak penyedia pinjaman dana untuk pengambilan keputusan, karena tanpa proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik, analisis dan evaluasi kinerja UMKM tidak dapat dilakukan (Shonhadji, *et.al.*, 2017).

Anggapan pelaku UMKM saat ini bahwa, laporan keuangan dinilai sebagai bagian bisnis yang tidak berpengaruh pada *income gathering* yang menjadi fokus utama UMKM (Alyas dan Rakib, 2017). Berdasarkan Data Bank Indonesia tahun 2015, UMKM sejak tahun 2013 memiliki kecenderungan tidak membuat laporan keuangan dengan prosentase 77,5%, sedangkan sisanya 22,5% memiliki laporan keuangan sederhana menggunakan *cash basis*. Dari sisi jenis laporan keuangan yang dimiliki, 23,2% membuat neraca, 34,3% laba rugi, dan 30,9% laporan persediaan barang sedangkan 53% membuat laporan pemasukan



dan pengeluaran kas. Laporan keuangan yang disajikan seyogyanya merupakan sumber informasi terkait kinerja dan kondisi UMKM yang digunakan untuk membantu para *stakeholder* untuk mengambil keputusan ekonomi (Putra, 2012). Laporan keuangan harus disajikan sesuai standar yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan pada UMKM dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan tingkat kemajuan setiap usaha secara periodik (Putra, 2012; Endra, 2012). SAK-EMKM per 1 Januari 2018 merupakan standar yang diterima umum untuk digunakan sebagai *guide lines*, tidak lagi *based lines*.

“...SAK EMKM is intended to meet the Financial Reporting needs of Micro, Small and Medium Entities...” (Winarningsih *et.al.*, 2016).

Laporan keuangan merupakan *output* dari proses akuntansi yang digunakan dalam menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan ekonomi (Putra, 2012), (Weygandt, 2015). Melalui laporan keuangan yang disajikan berdasarkan SAK-EMKM, akan mempermudah *stakeholder* dalam segala pengambilan keputusan (*decision making*) karena bersifat *realible*, *relevant*, *akuntable*, *transparent*, dan *comparable*. Penyajian laporan keuangan yang sesuai sistematis akuntansi berdasarkan SAK EMKM akan memberikan manfaat lebih bagi pelaku UMKM (Shunhadji *et.al.*, 2017), diantaranya:

1. UMKM dapat mengetahui kinerja usaha dan kinerja keuangan
2. UMKM mengetahui, memilah, dan membedakan antara harta pribadi dan dana usaha
3. UMKM dapat mengetahui posisi dana, baik sumber dana maupun penggunaannya
4. UMKM mampu membuat anggaran yang tepat sesuai kebutuhan
5. UMKM dapat menghitung SPT Pajak tahunan yang ditanggunghkan
6. UMKM dapat mengetahui aliran tunai selama periode tertentu

Manfaat tersebut seharusnya memberikan peluang besar bagi para akuntan untuk turut berkontribusi dalam permasalahan UMKM saat ini. Penyajian laporan keuangan sesuai SAK EMKM guna memiliki tujuan umum (*general purpose financial statement*) (SAK EMKM, 2018.1:b). Menurut *The Organization Economic Corporation and Development* (2017) menyatakan urgensi UMKM untuk membuat laporan keuangan yang sesuai adalah:

“Every organization that runs a business is suggested to have accounting reporting to help analyze their financial situation, therefore it could help in making decisions..”

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, UMKM secara sadar dan mandiri harus menyajikan laporan keuangan terkait secara periodik sesuai SAK EMKM (SAK EMKM, 2018:3:3.9). Berdasarkan standar tersebut, UMKM dapat menerapkannya sesuai kebutuhan karena sifatnya yang sederhana dengan beberapa perlakuan khusus (Newsletter, 2017), diantaranya:

1. Komponen Laporan hanya terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Dasar pengukurannya menggunakan basis biaya historis (*historical cost basis*).

3. Tidak mengkaui adanya penurunan nilai (kecuali bidang jasa keuangan).
4. Aset disusutkan dengan metode garis lurus/ saldo menurun tanpa nilai residu.
5. Laporan komparatif hanya disajikan 1 dengan periode sebelumnya.
6. Koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi bukan bagian dari laba-rugi selama periode perubahan.
7. Metode yang digunakan adalah akrual (*accrual basis*).

SAK-EMKM juga menuntut untuk menyajikan laporan secara wajar yang mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang dijelaskan dalam *Konsep dan Prinsip Pervasif* (SAK EMKM, 2018:3:3.2). Laporan keuangan yang disajikan oleh UMKM merupakan syarat kuat yang harus dipenuhi oleh UMKM jika ingin mengajukan dana kredit sebagai pembiayaan modal usaha, karena akan menyajikan tentang kondisi keuangan, kondisi usaha, dan posisi keuangan UMKM (Warsono, 2010).

Penyusunan laporan keuangan turut mempercepat dan mempermudah instansi kantor pajak dalam menentukan PPh final yang akan dikenakan pada UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah PP No.46 Tahun 2013 yang selama ini menjadi permasalahan antara pelaku UMKM dan pihak pajak. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dapat meningkatkan skema literasi pembiayaan modal dari bank (Shonhadji, *et.al*, 2017)., karena menghindarkan anggapan bank terhadap prinsip kehati-hatian untuk memberikan kucuran dana terkait ketidakjelasan kinerja UMKM selama ini.

#### **Penyajian Laporan Keuangan dan Laporan Tambahan melalui IFR**

Perkembangan era digital saat ini telah memberikan peluang sekaligus tantangan bagi para pelaku UMKM dan industri kreatif guna menghadapi persaingan global. Berkembangnya UMKM dalam pasar global juga dituntut untuk lebih membuka komunikasi dengan pihak eksternal. Hubungan komunikasi eksternal tersebut berkaitan dengan usaha UMKM untuk memperoleh relasi kerja guna memperlancar literasi keuangan pembiayaan modal, baik dengan pihak bank maupun lembaga keuangan lainnya (Ningtyas, 2017). Guna membangun komunikasi tersebut, internet merupakan media yang memiliki daya jangkauan yang luas, sehingga mempermudah siapapun yang akan mengakses informasi terkait kinerja UMKM tanpa adanya batasan. Menurut *Financial Accounting Standards Boards* (FASB) internet memiliki beberapa karakteristik dan keunggulan seperti memfasilitasi penyebaran informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, tepat waktu, memilih akses global dan berbiaya rendah (Rendi, 2013).

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pihak penyedia dana baik formal/non formal menginginkan adanya efisiensi dan efektifitas dalam penyaluran pinjaman pembiayaan modal kepada UMKM tanpa tatap muka. Disisi lain, UMKM juga dituntut untuk memanfaatkan teknologi yang mampu memudahkan segala bentuk *financial access* para penggunanya.. Sebagai jembatan antara kebutuhan informasi kinerja dan tuntutan *financial access* pada UMKM, maka diperlukan media penyajian laporan keuangan dan non keuangan. *Internet Financial Reporting* (IFR) merupakan media penyajian laporan keuangan dan non keuangan melalui *website* perusahaan yang dapat pula diaplikasikan kedalam optimalisasi *financial technology* (Irwandi dan Fitria, 2012). Menurut Lie *et.al.*, (2010) IFR merupakan

pencantuman informasi keuangan perusahaan melalui internet atau *website* yang mengubah konsep *paper based reporting system* menjadi *paper less reporting system*. Pemanfaatan IFR dalam optimalisasi *financial technology*, menurut Amalia (2009) akan menunjukkan perusahaan tersebut mampu bersaing secara global, karena perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang memanfaatkan secara optimal teknologi dalam kegiatan usahanya. Pemanfaatan IFR sebagai media penyajian laporan keuangan dan non keuangan UMKM akan memberikan manfaat lebih jika dibandingkan dengan laporan tradisional. Sejalan dengan *Signaling Theory* bahwa perusahaan dapat menjalin hubungan melalui media kepada pemangku kepentingan perusahaan terkait apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Dengan pemanfaatan IFR dinilai mampu mempermudah pihak UMKM dan para pemangku kepentingan untuk menjalin hubungan kerja meskipun tidak melakukan tatap muka. Laporan yang disajikan akan menunjukkan informasi yang dibutuhkan para *stakeholder*, baik kreditur maupun investor sebagai pelaporan pertanggungjawaban manajemen dan pihak lain dalam mengambil keputusan (Novita, 2017).

Menurut Debreceeny *et.al* (2002), (Almilia, 2008), Narsa dan Pratiwi (2017) mengungkapkan bahwa penyajian laporan keuangan melalui internet (IFR) akan membentuk pembuatan laporan keuangan yang lebih mudah dan cepat, sehingga mudah untuk diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Dalam FASB (*Financial Accounting Standard Board*) (2002) dalam (Momany *et.al*, 2006), penyajian laporan keuangan menggunakan media internet dapat pula mempercepat proses penyajiannya. Pelaporan ini sangat mempermudah pihak *stakeholder* untuk melakukan akses informasi keuangan UMKM guna menganalisis kinerja usaha sehingga membantu dalam proses pengambilan keputusan (*decision making*) (Putra, 2012). Konsep inilah yang mendukung UMKM untuk memanfaatkan IFR dalam optimalisasi *fintech* untuk membangun *competitive advantage* guna membantu kinerja UMKM, khususnya dalam penyajian laporan keuangan sebagai eskalasi pembiayaan modal berbasis *stakeholder value*. UMKM dinilai mampu memiliki daya saing jika UMKM telah mengembangkan inovasi usaha dan selalu menggunakan teknologi (Affifudin, 2010:108)

### **Implementasi *Financial Technology* pada UMKM**

Sebagai langkah mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui UMKM dan industri kreatif, pemerintah menekankan pada beberapa pilar bidang, diantaranya: *People, Industry, Technology, Resources, Institutions, and Financial Intermediary* (Barus, 2016). *Business Concern* yang banyak dikembangkan di Indonesia saat ini, terkait industri dalam pemanfaatan teknologi, tidak terkecuali inovasi tersebut dapat pula dikembangkan pada sektor UMKM (Alyas dan Rakib, 2017). Dalam pilar pengembangan industri kreatif dan UMKM, sebagai salah satu industri yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat, UMKM perlu membangun pemanfaatan teknologi di era digital saat ini (Putri & Agustina, 2017). Menanggapi hal tersebut, *financial technology* merupakan inovasi yang dinilai dapat meningkatkan pangsa pasar UMKM sebagai langkah dalam mengatasi permasalahan terkait pembiayaan modal, penyusunan laporan keuangan, pembayaran dan pemasaran, serta transaksi keuangan dan literasi keuangan

lainnya. Beberapa *fitur startup financial technology* dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan UMKM saat ini.

**Table 3.** Pemanfaatan *Startup Financial Technology* terkait Permasalahan UMKM

No	Permasalahan	Rekomendasi Berbasis <i>Fintech</i>	Manfaat
1	Pembiayaan utang/masal ( <i>crow</i> )	<i>Startup Crowdfunding</i>	Meningkatkan literasi pembiayaan berbasis teknologi informasi
2	Pinjaman Pembiayaan modal	<i>Startup Lending</i>	Eskalasi pembiayaan modal UMKM melalui pinjaman sesuai regulasi Nomor 77/POJK.01/2016
3	Pemisahan harta pribadi dan harta usaha, perencanaan keuangan, dan penyusunannya	<i>Startup Personal Finance</i>	Mengembangkan literasi dan edukasi keuangan terkait penyusunan dan pelaporan keuangan ( <i>financial planning</i> )
4	Aktivitas <i>financial access</i>	<i>Startup Payments</i>	Meningkatkan arus pembayaran dan transaksi bebas akses yang lebih luas, cepat, efektif dan efisien
5	Pembanding Produk-Produk Keuangan dan Usaha	<i>Financial Aggregator</i>	Eskalasi aksesibilitas atas perbandingan setia produk-produk keuangan yang dibutuhkan UMKM

**Sumber:** Kantor Industri *Financial Technology (Fintech)* Indonesia

Sejalan dengan *Technology Acceptance Model (TAM) Theory* bahwa pemanfaatan teknologi akan memberikan reaksi positif terhadap para penggunanya. Sejalan dengan penelitian Amalia (2009) bahwa usaha yang memiliki daya saing adalah jenis usaha yang menggunakan teknologi sebagai bagian dari usahanya. *Financial technology* dinilai tepat untuk pengembangan UMKM jika disesuaikan dengan kebutuhan, *cost and benefit*. *Financial technology* akan membantu segala bentuk *financial access* pada UMKM, serta membangun komunikasi bisnis melalui optimalisasi IFR sebagai pelengkap kebutuhan Informasi. Pemanfaatan tersebut akan membantu permasalahan klasik UMKM berkaitan dengan pembiayaan modal dan pemasaran, yang didukung dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Pemanfaatan teknologi informasi akan mempercepat analisis kinerja keuangan atas laporan keuangan yang disajikan untuk pengambilan keputusan (Haysim, Hidayah, dan Latisuro, 2014). Pada dasarnya, optimalisasi *fintech* menggunakan IFR akan meningkatkan nilai lebih UMKM dimata para *stakeholdernya*.

#### **Stakeholder Value pada UMKM**

Permasalahan rendahnya penerimaan pembiayaan modal UMKM dari lembaga keuangan formal maupun non formal dikarenakan pihak pemberi dana cenderung memiliki kehati-hatian terhadap resiko yang akan ditimbulkan akibat pihak penyedia dana tidak dapat menganalisis secara pasti terhadap informasi laporan keuangan yang disajikan oleh UMKM dalam mengajukan pembiayaan

modal (Kuinafi, 2017). UMKM seharusnya memiliki inovasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya guna memberikan informasi kinerja keuangan secara lebih relevan sehingga dapat mempermudah pihak penyedia dana dalam menganalisisnya tanpa ada kehati-hatian. Disisi lain, UMKM harus memiliki daya saing yang dapat meningkatkan nilai lebih kepada para pengguna informasi (*stakeholder*), sehingga ada kepercayaan (*trust*) yang akan diberikan kepada pihak UMKM. Menurut Greenwood dan Van Burren (2010) menyatakan:

*“Trust is essential to the organization-stakeholder relationship because the stakeholder group is reliant upon the organization to return its due rights...”*

Penyajian laporan keuangan melalui IFR (*Internet Financial Reporting*) yang disesuaikan dengan SAK-EMKM dapat meningkatkan perhatian investor (*investors interested*) dan membangun *image positive* terhadap nilai perusahaan (Irwandi dan Prasetya, 2012). Penggunaan internet dalam laporan keuangan juga dapat meningkatkan keinginan investor untuk memberikan tambahan pembiayaan modal sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Ettredge *et.al.*, 2002). Didalam IFR, dapatpula disajikan informasi terkait profil usaha dan item perusahaan, dimana pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan melalui IFR masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) (Narsa dan Pratiwi, 2017). Konsep tersebut dapat diartikan bahwa pengungkapan ini sebagai usaha untuk membuka diri dalam memberikan informasi (*disclosure aspect*) terkait laporan keuangan (Almalia, 2008). Penyajian laporan keuangan dan non keuangan melalui internet (IFR) dapat diakses secara lebih banyak jika dibandingkan dengan *paper based reporting* (Irwandi dan Prasetyo, 2012). Pengungkapan laporan UMKM yang lebih transparan dan terbuka mampu meningkatkan kualitas kepercayaan *stakeholder* sebagai pengguna informasi yang disajikan (*trust performance*). Menurut Taufiq, faktor utama dalam menentukan keputusan investor untuk berinvestasi ataupun meminjamkan dana pembiayaan modal adalah kepercayaan (*trust*). Menurut Fukuyama (1995) dalam Pirson, Martin and Parmar (2017) menyatakan bahwa tanpa adanya kepercayaan dari *stakeholder*, maka institusi termasuk sebuah bisnis tidak dapat berjalan secara produktif.

Konsep tersebut menyebutkan bahwa kualitas kepercayaan akan sangat berpengaruh terhadap keputusan para *stakeholder*. Sehingga, pengungkapan laporan keuangan dan non-keuangan melalui IFR ini akan mempengaruhi dan mendorong (stimulus) keputusan investor untuk berinvestasi (Narsa, 2014). Sejalan dengan *Signaling Theory*, bahwa segala informasi yang diungkapkan akan memberikan sinyal positif terhadap intensitas penggunaannya sehingga mampu memperluas pangsa pasar (Luciana, 2008). Kualitas kepercayaan *stakeholder* merupakan aset tak berwujud (*intangible asset*) yang memiliki nilai jangka panjang (*long-term*). Beberapa penelitian menyebutkan dampak dan pengaruh dari kualitas kepercayaan terhadap usaha bisnis, diantaranya:

**Tabel 4.** Dampak Kualitas Kepercayaan (*Trust*) Pada *Stakeholder Value*

No	Author	Research Content
1	Fukuyama (1995) Pirson, Martin and Parmar (2017)	<i>Without trust, many institutions include business wouldn't be productive</i>

- 
- |   |                                            |                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Barney and Hansen (1994) and Jensen (2003) | <i>Trust as the strengthening relationships between the firm and its various stakeholders, where is trust can serve as a source of competitive advantage for the organization</i> |
| 3 | Adams (2012)                               | <i>Trust in business has reached alarmingly low levels</i>                                                                                                                        |
| 4 | Adelman (2012)                             | <i>Trust in business has decreased across the board even lower around the globe</i>                                                                                               |
| 5 | Luhman (1979)                              | <i>Trust is like lubricant of society and business</i>                                                                                                                            |
| 6 | Davis (2000)                               | <i>Trust in the business context has been widely recognized as a key enabler of organizational success</i>                                                                        |
| 7 | Fombrun and Riel (2003)                    | <i>Trust in business will be impact of brand of the organization</i>                                                                                                              |
- 

**Sumber:** Cross Mark-*Journal of Business Ethics* (2017) 145:1-20

Beberapa usaha bahkan berusaha membangun nilai kepercayaan *stakeholder* melihat manfaat yang diperoleh bersifat jangka panjang, walaupun untuk memperoleh kepercayaan tersebut suatu usaha harus mengeluarkan biaya lebih untuk membangun citra positif. Dampaknya, perusahaan tidak akan memperoleh laba maksimum, namun hanya memperoleh laba optimum dalam jangka panjang. Orientasi *going concern* bisnis tersebut memberikan nilai lebih dimata para *stakeholder*. Tujuan jangka panjang entitas adalah untuk meningkatkan nilai dari para *stakeholdernya* (Narsa dan Pratiwi, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Narsa dan Pratiwi (2017) menunjukkan bahwa investor yang memperoleh informasi dengan cepat dan relevan akan berusaha untuk meningkatkan *return* yang akan diberikan untuk diinvestasikan. Tujuan peningkatan nilai perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap manajemen usahanya karena setiap peningkatan nilai (*value*) akan menunjukkan seberapa baik manajemen pengelolaan perusahaannya. Dalam *Theory of The Firm* tujuan utama dalam suatu usaha perusahaan adalah memaksimalkan nilai (Salvatore, 2005).

Konsep yang sama berlaku bagi kegiatan UMKM, dimana perlu adanya peningkatan nilai usaha yang dikembangkan oleh UMKM dalam operasional utama (*main operating*). Informasi yang secara transparan disajikan akan meningkatkan *image* positif setiap organisasi/perusahaan yang melaporkannya karena akan berkaitan dengan reputasi yang memberikan nilai lebih bagi organisasi/perusahaan tersebut dimata *stakeholder* dimasa sekarang (*present*) maupun dimasa yang akan datang (*future*) (Narsa dan Pratiwi, 2017). Tujuan untuk memberikan nilai lebih kepada para *stakeholder* guna merangsang pembiayaan modal UMKM inilah yang dikenal sebagai *stakeholder value concept*. Rujukan *stakeholder* sesuai KDPPLK-SAK adalah investor, calon investor, kreditur, calon kreditur, pemerintah, dan *stakeholder* lainnya.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan analisis data tersebut, permasalahan UMKM dapat terminimalisir dengan meningkatkan nilai *stakeholder value* untuk meningkatkan faktor *feasible* dan *bankable* guna memperoleh pembiayaan modal, beberapa rekomendasi tersebut diantaranya adalah:

**Tabel 5.** Analisis Rekomendasi Permasalahan

No	Permasalahan	Rekomendasi	Manfaat
1	Syarat <i>Bankable</i>	Menyajikan laporan keuangan sesuai SAK EMKM	Memenuhi syarat administratif dan sebagai sumber informasi analisis kinerja keuangan UMKM
2	Syarat <i>Feasible</i>	Menyajikan laporan non-keuangan sebagai laporan tambahan	Sebagai sumber informasi tambahan analisis prospektus UMKM
3	Proses pembiayaan tanpa tatap muka	Menyajiakn laporan keuangan dan non keuangan melalui <i>IFR</i>	Meningkatkan daya <i>borderless-ness, realtime, relevant, pervasivness, transparency, akuntable, dan comparable</i>
4	Perrhitungan PPh Final	Memisahkan antara harta pribadi dan harta usaha UMKM	Memudahkan pihak pemungut paajak dalam menghitung PPh final yang ditanggihkan
5	Tuntutan <i>Financial Access</i>	Menggunakan <i>Financial Technology</i> (No.77/POJK.01/2016)	Meningkatkan efesiensi dan efektifitas segala <i>financial access</i> penggunaanya pada era digital
6	Prinsip Kehati-hatian Bank/ <i>stakeholder</i>	Menyajikan informasi keuangan sesuai SAK EMKM	Meningkatkan <i>trust performance quality</i> berbasis <i>stakeholder value</i>
7	Kualitas SDM	Menyelenggarakan <i>sustainable training</i>	Menekan biaya karyawan dan memberdayakan karyawan yang sudah ada secara optimal
8	Pembiayaan, Perencanaan Keuangan, dan Pelaporan, dll	Menggunakan <i>startup fintech</i> yang sesuai kebutuhan ( <b>tabel 3</b> )	Memudahkan segala bentuk aktivitas pembiayaan, pembayaran, perencanaan keuangan, pelaporan dan <i>personal finance</i>

## SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan permasalahan dan hasil analisis data dan sumber informasi terkait lainnya dengan diperkuat studi literatur yang digunakan, maka permasalahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia dapat disimpulkan bahwa:

- UMKM masih mengalami kemacetan pembiayaan modal karena tidak memenuhi syarat administratif (*bankabel & feasible*).
- UMKM tidak memiliki kepercayaan penuh dari para *stakeholder*, khususnya bank terkait usaha keberlanjutan usaha.
- Tingginya prinsip kehati-hatian pihak penyedia dana untuk memberikan pembiayaan pada UMKM terkait risiko usaha.
- Rendahnya daya aksesibilitas informasi keuangan dan non keuangan UMKM oleh *stakeholder* luas.



- e. UMKM mengalami kesulitan membedakan harta pribadi dan dana untuk usaha karena pencatatan menggunakan *cash basis*.
- f. UMKM memiliki keterbatasan dalam *financial access* pada era digital.
- g. Pihak pajak kesulitan untuk menentukan PPh final yang ditangguhkan pada UMKM.
- h. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang diberdayakan, khususnya dalam pengelolaan keuangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adams, S. (Ed.).(2012).”*Trust in business falls off a Cliff in Forbes*”.  
<http://www.forbes.com/sites/susanadams/2012/06/13/trust-in-business-falls-off-a-cliff/>. (Di akses 24 Januari 2018 Pukul 19:34 WIB)
- Almilia, L. S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela “Internet Financial and Sustainability Reporting,”* Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol 12. No.12, 117-131.
- Almilia, L. S. (2009). *Analisa Komparasi Indeks Internet Financial Reporting Pada Website Perusahaan Go Publik Di Indonesia.* In *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI).*, ISSN: 1907-5022, 31-32
- Alyas & Rakib. (2017). *Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Pada Usaha Roti Maros Di Kabupaten Maros).*Sosiohumaniora.Vol.19,No.2:114-120.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang-Universitas Negeri Makassar.
- Allam, A., & Lymer, A. (2003). *Developments in Internet Financial Reporting: Review and analysis Across Five Developed Countries.* The International Journal of Digital Accounting Research. Vol.03, No. 6, Hal.165-199.
- Barney, J. B., & Hansen, M. H. (1994). *Trust Worthness as a Source of Competitive Advantage.* Strategic Management Journal, Vol.15,175-190.
- Barus. (2016). *Peran Internet dalam Komunikasi Pemasaran Produk UMKM.* Jurnal Administrasi Bisnis.Vol.12 No.1. Universitas Katholik Parahyangan. Bandung.
- Chhabra K. S. & Pattanayak J. K. (2015). *“Financial Accounting Practices Among Small Enterprise:Issues and Challanges”*.29 April 2015.
- Davis, F. D., Schoorman, F. D., Mayer, R. C., & Tan, H. H. (2000). *The Trusted General Manager and Business Unit Performance, Empirical Evidience of a Competitive Advantage.* Strategic Management Journal, Vol. 21, Hal.563-576.
- Debreceny, R., G. L. Gray, and A. Rahman.(2002). *The Determinants of Internet Financial Reporting.* Journal od Accounting and Public Policy. Vol.21: 371-394.
- Edelman, R. (Ed.). (2012).”*Trust on the Brink in Edelman Trust Barometer*”.  
<http://trust.edelman.com/trust-download/globalresults/>. (Di akses 24 Januari 2018 Pukul 19:44 WIB)
- Etredge, M., V. J. Richardson, dan S. Scholz. (2002). *Determinants of Voluntary Disemination of Financial Data At Corporate Web Sites.* Paper presented at the Hawaii International Confrencee on System Sains Hawaii.
- FASB. (2000). *Business Reporting Research Project: Electronic Distribution of Business Reporting Information.* Steering Committee Report Series,1.
- Fisher, Laswad, dan Oyelere. (2000). *Financial Reporting on The Internet.*Accountans Journal of New Zealand.Available at [www.ssrn.com.Fombrun](http://www.ssrn.com/Fombrun). (22 Januari 2018)
- Fukuyama, F. (1995). *Trust-The Social virtues and the creation of prosperity.* New York:Simon & Schuster Inc.

- Fombrun, C. J., & Van Riel, C. (2003). *Fame and fortune-How successful companies build winning reputations*. Upper Saddle River: Financial Times-Prentice Hall.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management; A Stakeholder Approach*. Boston, MA: Pitman.
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. A., Parmar, B. L., & de Colle, S. (2010). *Stakeholder Theory; The State of the art*. Cambridge: University Press.
- Greenwood dan Van Burren.(2010). *Trust and Stakeholder Theory: Trustworthiness in the organization-Stakeholder Relationship*. Journal of Business and Ethics. Vol.95:425-438.
- Hasyim, N., Hidayah, N. A., & Latisuro, S. W. (2014). *Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Berbasis Web Pada Koperasi Warga Baru MTSN 17 Jakarta*. Jurnal Sistem Informasi, 7(2),1-10.
- Hasyim. (2013). *Kualitas Manajemen Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus Pada Distribution Store (Distro) Di Kota Medan*. JUPIIS.Vol.5, No.2. Universitas Medan. Medan.
- Horne, Van dan Wachowicz. JR. (2007). *"Prinsip-prinsip manajemen keuangan"*. Jakarta.Salemba Empat.
- Indrajit. (2017). *Analisis Pertumbuhan PembiayaanUMKM Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih BPRS Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam.Vol.8 No.1:47-58.
- Indriani & Fitria. (2017). *Skim Pembiayaan UMKM dan Peningkatan Kinerja UMKM Furniture Jepara*. Jurnal Fokus Bisnis.Vol.16, No.01.Universitas Diponegoro.
- Irwandi & Prasetya. (2012). *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi pelaporan keuangan melalui internet (internet financial reporting) pada perusahaan manufaktur Di Bursa Efek Indonesia*. The Indonesia Accounting Review.Vol.2,No.2. STIE Perbanas Surabaya.
- Irawan et.al., (2016). *Dana Pihak Ketiga, Rasio Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Dan Tingkat Pengembalian Investasi dan Pembiayaan UMKM*. Jurnal Liquidity.Vol.5, No.2.STIE Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Kasim & Kuresin. (2017). *Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Komputer Bagi UMKM dan Komunitas Kendal Gede Kreatif*. Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas. Vol. 01 No. 02.STIE Ekuitas.
- Khan, D. M., & Ismail, P. D. (2011). *The Use of Disclosure Indices in Internet Financial Reporting Research*. Journal of Global Business and Economics, Vol.3 No.1.
- Khan, D. M., & Ismail, P. D. (2011). *The Level of Internet Financial Reporting of Malaysian Companies*, Asian Journal of accounting and Governance, 2, 27-39.
- Kunafi et.al., (2017). *Pengaruh Literasi Keuangan dan Persyaratan Kredit terhadap Akses Kredit Formal pada UMKM Di Surabaya*. Jurnal Sains dan Seni ITS. Vol.6, No.1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.

- Kurnianto, Narsa & Widodo. (2012). *Mengungkap Kesiapan UMKM Dalam Implementasi PSAK-ETAP Untuk meningkatkan Akses Modal Perbankan*. Majalah Ekonomi. Tahun XXVI. No.3. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Lai-S.-C., Lin, C., Li, H.-C., & Wu, F.H. (2010). *An Empirical Study of The Impact Of Internet Financial Reporting on Stock Prices*, The International Journal of Digital Accounting Research, 10, 1-26.
- Lawita & Samsiah. (2017). *Review the Readiness of MSMEs in Indonesia Compliance with Accounting Standards Micro, Small, and Medium Enterprise (SAK EMKM)*. Jurnal Akuntansi & Ekonomika. Vol.7, No.02. Universitas Muhammadiyah Riau.
- Lestari, N. (2014). *Analisis Jumlah Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Tahunan Perbankan Syariah melalui Website*. Skripsi Mahasiswa, Fakultas Ekonomi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Luhmann, N. (1979). *Trust: A mechanism for the reduction of social complexity*. New York: Wiley.
- Mariani. (2017). *Pengaruh Perkembangan UMKM Terhadap Kepuasan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Surya Abadi Mandiri Medan Krio*. Jurnal Ilmiah Research Sains. Vol.3, No.1.
- Momany, Munther Talal, dan salah Al-Dain Al-Shorman. (2006). "Web-Based Voluntary Financial Reporting of Jordanian Companies". International Review of Business Research Papers, Vol. 2, No. 2, Pp. 127-139.
- Mooduto, W. I. S. (2013). *Reaksi Investor atas pengungkapan Internet Financial Reporting*. Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3, No. 2, Hal. 479-492.
- Narsa, I. M. & Pratiwi, F. F., (2017). *Internet Financial Reporting, Pengungkapan Informasi Website, Luas Lingkup Pengungkapan Internet dan Nilai Perusahaan*. EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 18 (2), 259-273.
- Newsletter Russell Bedford SBR. (2017). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah*. Edisi No.4. Jakarta.
- Nugroho, Kurniawati & Arifin. (2012). *Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. JMK. Vol.10, No.2. Universitas Kristen satya Wacana.
- Ningtyas. (2017). *Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan)*. Riset & Jurnal Akuntansi. Vol.2
- Nkundabayanga, K. S., Kasozi, D. & Nalukenge, I., (2014). *Lending terms, financial literacy, and formal credit accesibility*. International Journal of Social Economics, 41(5), pp. 342-361.
- Parmar, Marti & Pirson. (2017). *Formation of Stakeholder Trust in Business and the Role of Personal Value*. Journal Business Ethics 145:1-20.
- Putra, hermon., A dan Elizabeth Penti K. (2012). *Penyusunan Laporan Keuangan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)*. Proceeding for Call Paper. Salatiga. FEB UKSW.
- Pratiwi, A., D., & Hermana, B. (2014). *Comparing Internet Financial Reporting Index Between Bank and Non-Bank in Indonesia*. The Journal of Internet Banking and Commerce, 18(2).

- Putri. (2017). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda)*. eJounal Adminsitrasi Negara, Vol.5 No.1. Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Putri & Agustina. (2017). *Peran Mahasiswa Akuntansi Sebagai Pendorong UMKM bersaing dalam MEA*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.18, No.2.
- Purba, L., Medyawati, H., Silfianti, W., & Hermana, B. *Internet Financial reporting Index Analysis; An Overview from the State Owned Enterprises in Indonesia*. Journal of Economics, Business and Management, Vol. 1, No.3
- Prasetya, M. Dan S. A. Irwandi. (2012). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan melalui Internet (Internet Financial Reporting) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. The Indonesian Accounting Review. Vol. 2, No.2.
- Raselawati, Ade. (2011). *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM di Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Rendi Satria dan Supatmi. 2013. "Reaksi Pasar Sebelum dan Sesudah Internet Financial Reporting." Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 15. No. 2 November 2013. Halaman 86-94.
- Rizqiyah, R., N., Lubis. (2017). *Penerapan Internet Financial Report (IFR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. Vol.5(1) 63-81
- Sari, R. C., & Zuhrotun. (2006). *Keinformatifan Laba di Pasar Obligasi dan Saham: Uji Liquidation Option Hypothesis*. SNA IX, K-AKPM 08.
- Salvatore, D. (2005). *Managerial Economic: Ekonomi Manajerial dalam Perekonomian Global (Kelima ed)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shunhadji, Aghe & Djuwito. (2017). *Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada usaha kecil dan menengah Berdasarkan SAK EMKM di Surabaya*. SENIAS 2017. Universitas Islam Madura.
- Sonny Warsono. (2010). *Akuntan UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikan*. Asgard Chapter.
- Susilo. (2010). *Peran Perbankan Dalam Pembiayaan Di Proinsi Yogyakarta*. Jurnal keuangan dan Perbankan, Vol.14, No.3. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Soetrisno, Noer. (2004). *Posisi an peran Pembangunan UKM 2004-2009*. Infokop Nomor 25 Tahun XX.
- Shehata, N. F. (2014). "Theories and Determinants of Voluntary Disclosure". Accounting and Finance Research, Vol. 3, No.1.
- Silva dan Lira Alves. (2004). *The Voluntary Disclosure of Financial Information on The Internet and The firm Value Effect in Companies Across Latin America*.
- Taufiq. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM dalam mengambil keputusan Investasi Di Surabaya*. UPV Veteran Jawa Timur. Surabaya.
- The Organization Economic Corporation and Development. (2017). *Financial Education For Micro, Small and Medium-Sized Enterprise in Asia*.

- Warsono, Sony, Arif Darmawan, dan M.Arsyadi Ridha. (2010). *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dioahami dan Dipraktikan*. Asgard Chapter Yogyakarta.
- Weygandt, Jerry J. (2015). *Financial Accounting IFRS Edition*. Publisher John Wiley & Sons Inc.
- Winarningsih, S., Yunita, N., Sandika, T., T., and Purnama, G. (2016). "*Sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan Untuk UMKM: Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM & Koperasi Berbasis SAK EMKM*". Bandung.
- Willopo, Arifin & Chairulloh. (2017). *Analisis Peluang dan Ancaman Serta Strategi daya saing UMKM Di Indonesia Dalam Rangka Menghadapi ASEAN Aconomics Community (AEC) Studi Kasus Oada CV.Kajeye Food dan CV. Harum Manis di Malang*. Jurnal Adminsitasi Bisnis.Vol.53. No.2.Universitas Brawijaya.Malang.

**SUMBER DATA :**

- Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2016) (Diakses 19 Januari 2018)
- Data Kementerian Perdagangan (2010) (Diakses 19 Januari 2018)
- Data Departemen pengembangan UMKM- Bank Indonesia (2016) (Diakses 19 Januari 2018)
- Data Statistik Perbankan Syariah (OJK) Periode 2016 (Diakses 19 Januari 2018)
- Data Kredit UMKM Bank Indonesia (2012-2017) (Diakses 19 Januari 2018)
- Data Bank Kementrian Koperasi UKM (2014-2017) (Diakses 19 Januari 2018)
- Data LPPI Bank Indonesia (2013-2017) (Diakses 19 Januari 2018)
- Data Badan Pusat Statistik (2017) & Departemen Pengembangan UMKM (Diakses 19 Januari 2018)